DETERMINAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Imam Ma'ruf

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : muhammadimammaruf@yahoo.com

Andi Samsir

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : syamsir_fe03unm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berapa besar pengaruh Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya, Jumlah Penduduk, dan jumlah penerimaan Pajak terhadap jumlah Anggaran Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis *time series* dalam bentuk tahunan, terhitung dari periode 2000 sampai 2015. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah Anggaran Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2000-2015, sedangkan variabel jumlah penerimaan Pajak dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap perubahan jumlah Anggaran Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2) Variabel bebas dengan nilai $R^2 = 0,704$ adalah valid menunjukkan bahwa nilai tersebut 70,4 % digunakan untuk memprediksi perubahan jumlah Anggaran Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan selebihnya 29,6 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Anggaran Pembangunan, Anggaran Pembangunan Tahun Sebelumnya, Jumlah Penduduk dan Pajak

DETERMINE OF GOVERNMENT BUDGET ALLOCATION IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Muhammad Imam Ma'ruf

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : muhammadimammaruf@yahoo.com

Andi Samsir

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : syamsir_fe03unm@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aims of this research are to determine and to analyze the effect of government budget in the previous year, population, and tax revenue toward developmental budget in South Sulawesi Province. This research used quantitative data; type of data is time series (annually). Time series data has been used since 2000 until 2015. The tool which was used in this research was multiple linear regressions. This research showed 1) both variable of government budget in previous year and variable of population had a positive effect and significant toward development budget in South Sulawesi Province since period 2000 until 2015, while variable of tax revenue had no positive effect and was not significant toward development budget in South Sulawesi Province, 2) independent variable with value of $R^2 = 0.704$ was valid. This score showed that 70.4 %

was used to predict the change of government budget in South Sulawesi Province, while the rest of value 29.6 % was affected by other variables out of the model.

Key Words : Regency Expenditure, Government Budget, Government Budget in Previous Year, Population and Tax Revenue

PENDAHULUAN

Menurut Tadaro (1987) dan Rumarjo (1996), pembangunan secara luas selalu mengacu kepada proses perubahan struktural, baik struktur ekonomi maupun sosial budaya yang dapat menciptakan suatu kondisi aman bagi kehidupan umat manusia. Pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan suatu daerah karena dengan melalui pengeluaran, pemerintah berperan menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian anggaran dapat terbatas telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan akibat yang akan timbul jika dilihat dari perekonomian secara keseluruhan.

Sebagai stabilisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan didalam kerangka pelaksanaan prinsip anggaran berimbang yang dinamis diharapkan mampu menjadi sumber pengaman terakhir dalam upaya menjaga keserasian antara pengeluaran daerah dan penerimaan daerah, sehingga dapat memantapkan stabilitas ekonomi sekaligus menjamin berlangsungnya pembangunan daerah secara berkesinambungan (Davey, 1998).

Sebagai dinamisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan diharapkan mampu menunjang berkembangnya potensi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini terutama karena sebagai sumber utama pembiayaan investasi di sektor pemerintah, jumlah dan alokasi anggaran pembangunan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan terutama dalam mendorong perkembangan kegiatan dunia usaha dan laju perkembangan ekonomi daerah, khususnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat dan dunia usaha, diantaranya meliputi penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, serta proyek-proyek pembangunan produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong laju perkembangan ekonomi (Davey, 1998).

Untuk itu pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah agar dapat menampung kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*), dimana penyusun perencanaan pembangunan daerah secara bertahap, yakni musyawarah dan koordinasi dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Selain itu, guna tercapainya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya anggaran pembangunan yang optimal, tentunya diperlukan pengetahuan mengenai faktor-faktor determinannya. Disamping itu pula perlu diketahui sejauh mana APBD khususnya anggaran belanja pembangunan sebagai sumber daya yang terbatas telah mempengaruhi laju perkembangan ekonomi daerah.

Demikian pula halnya dengan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan APBD khususnya anggaran belanja pembangunan hendaknya pemerintah daerah senantiasa berupaya memperhatikan kebutuhan masyarakat daerah, yang mana APBD ini juga nantinya akan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di daerah itu sendiri.

Dalam kurun lima tahun terakhir, besarnya nilai APBD Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkat, diikuti dengan perubahan struktur baik pada bagian pendapatan maupun belanja. Dari sisi pendapatan, selama lima tahun terakhir, porsi dana perimbangan mengalami penurunan yang menunjukkan tingkat ketergantungan

daerah kepada anggaran pusat semakin menurun, namun demikian pada pos Lain-Lain PAD Yang Sah, porsinya mengalami peningkatan dalam kurun dua tahun terakhir, salah satunya didorong oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun sebelumnya yang cukup besar. Dari sisi belanja, terdapat hal menggembirakan pada tahun 2013, yaitu porsi belanja modal merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir sebesar 19,24 %. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, mengharapkan porsi belanja modal adalah 30 %. Kenaikan porsi belanja modal tersebut mencerminkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus menguat dalam pembangunan infrastruktur daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Penduduk dan Anggaran Pembangunan

Sobri (1987) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penambahan investasi (*capital stock*) dalam hal ini anggaran pemerintah daerah (APBD) adalah faktor penduduk. Lebih lanjut dikatakan bahwa besarnya anggaran pemerintah daerah (APBD) juga merupakan fungsi dan besarnya rotasi pengumpulan dana untuk pembangunan dari masyarakat yang diukur dari peningkatan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Senada dikemukakan Audiffret dalam Adisasmita (2009), bahwa 1) Pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian bagi penduduk sederhana sehingga kebijakan yang ditempuh pada waktu melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu; 2) Kemampuan melaksanakan pemerintahan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan, tanpa kemampuan pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijakan yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah, dimana semua kepentingan masyarakat sederhana sangat erat hubungannya; 3) Anggaran merupakan alat utama dalam pengendalian keuangan daerah sehingga rencana anggaran yang dibutuhkan haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana.

Penerimaan Pajak dan Anggaran Pembangunan

Pajak merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha pemeratakan distribusi hasil pembangunan seluruh rakyat, baik dalam mengatur pengeluaran pemerintahannya maupun dalam penerimaan pajaknya. Kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan secara efektif dapat membatasi konsumsi barang mewah dan pengeluaran masyarakat kelas atas yang percuma sehingga pajak dapat merupakan instrumen yang penting untuk mengurangi konsumsi swasta investasi perorangan dan mentransfer sumber-sumber yang terlantar untuk pembentukan modal pemerintah. Hal tersebut diperkuat dalam laporan PBB tentang "*teases and fiscal policy*" di mana kebijakan fiskal dibebani tugas utama untuk merebut tabungan dalam jumlah yang cukup dari output negara terbelakang yang sangat rendah untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan menyiapkan arena bagi kegiatan investasi publik yang lebih hebat (Jhingan, 1999).

Soemitro (1989) menyatakan bahwa kebijakan fiskal dengan menggunakan pajak sebagai instrumennya pada penerimaan negara difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut : 1) Lebih meningkatkan penerimaan dalam negeri; 2) Menciptakan pembagian beban pajak dan pembagian penghasilan lebih merata; 3) Mendorong pembangunan serta mengarahkan penggunaan sumber produksi; 4) Memantapkan stabilitas ekonomi; dan 5) Membantu memanfaatkan sumber daya-sumber daya.

Dengan demikian masalah pajak tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja sebagai suatu kewajiban kepada negara. Pajak harus pula dilihat dari sisi lain sebagai

alat perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan pembangunan yang berjalan, dan itu berarti mampu pula menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta menciptakan sarana perekonomian lainnya yang memperlancar roda perekonomian (Miraza, 1995).

Penerimaan pemerintah dari pajak berkaitan dengan pendapatan nasional yang mengikuti gelombang konjungtur sehingga bila pendapatan nasional meningkat maka penerimaan pajak juga meningkat dan sebaliknya. Pada waktu gelombang konjungtur meningkat, harga barang-barang naik dan industri memperoleh banyak permintaan sehingga perekonomian menuju ke arah inflasi, karenanya penerimaan pajak meningkat. Di sisi lain penerimaan pajak tersebut merupakan sisi kebocoran pada arus perputaran pendapatan nasional sehingga bila penerimaan pajak meningkat maka kebocoran pendapatan nasional juga akan membesar dan sebaliknya. Jadi penerimaan pajak dapat secara otomatis ikut menstabilkan gerak gelombang konjungtur. (Musgrave, 1991).

Kebijakan fiskal pemerintah dalam peningkatan maupun penurunan fungsi pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak banyak mendapat tanggapan dari para analisis ekonomi. Misalnya di Amerika Serikat, banyak analisis mengatakan bahwa kebijakan mengurangi tingkat pajak dapat mendorong pemulihan perekonomian yang pesat pada tahun 1983-1984, tetapi menurut para ahli yang dilihat dari sisi peningkatan pengeluaran untuk sipil dan pertahanan maka kebijakan mengurangi pajak tersebut justru menyebabkan ekonomi di Amerika Serikat terjadi defisit anggaran yang sangat besar di tahun-tahun yang akan datang (Samuelson, 1986).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) tahunan dari tahun 2000-2015 yang ditunjang dengan studi kepustakaan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis meliputi variabel-variabel yang dipilih dengan pengertian dasar atau konsep operasional sebagai berikut :

1. Anggaran Pembangunan adalah total anggaran pembangunan yang dikeluarkan untuk membiayai belanja pembangunan (Belanja Modal) dalam rupiah pertahun periode tahun 2000-2015, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).
2. Anggaran Pembangunan Tahun Sebelumnya adalah nilai realisasi anggaran pembangunan tahun sebelumnya (belanja modal tahun sebelumnya) di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2000-2015, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).
3. Jumlah Penduduk adalah jumlah seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2000-2015, yang dinyatakan dalam satuan jiwa.
4. Jumlah Penerimaan Pajak adalah total realisasi penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2000-2015, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPM), dan terbitan resmi pemerintah maupun dengan

cara studi pustaka dari literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Data

Alat analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya (AP_{t-1}), Jumlah Penduduk (JPdk), dan realisasi penerimaan Pajak (Pjk), terhadap Anggaran Pembangunan (AP) adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Teknik estimasi variabel terikat yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS), yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005). Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model, sebagai berikut :

$$AP = f (AP_{(t-1)}, JPdk, Pjk) \dots \dots \dots (1)$$

Dari persamaan 1, model dimodifikasi berdasarkan dalam bentuk logaritma sehingga dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

$$AP = \beta_0 + \beta_1 AP_{(t-1)} + \beta_2 JPdk + \beta_3 Pjk + e \dots \dots \dots (2)$$

- AP = Anggaran Pembangunan (Rp)
- $AP_{(t-1)}$ = Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya (Rp)
- JPdk = Jumlah Penduduk (jiwa)
- Pjk = Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
- e = *error term*
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Koefisien Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$)
- β_2 = Koefisien Jumlah Penduduk (JPdk)
- β_3 = Koefisien Realisasi Penerimaan Pajak (Pjk)

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis atau regresi maka dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu agar model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias (sahih). Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis secara serentak (simultan) menggunakan uji F (F-test) dimana nilai F-test dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat keyakinan tertentu. Dari uji F selanjutnya akan diputuskan menerima atau menolak hipotesis. Adapun uji statistik F adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} \dots \dots \dots (3)$$

Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka Hipotesis nol yang diterima berarti signifikan (H_1)

Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t (t-test), dimana nilai t-test dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat keyakinan tertentu. Adapun uji statistik t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1}{Sn(\beta_1)} \dots \dots \dots (4)$$

Hipotesis nol ditolak apabila nilai t tabel lebih besar daripada t hitung dan sebaliknya apabila nilai t tabel lebih kecil dari nilai t hitung maka hipotesis nol diterima. Untuk menguji keeratan hubungan antar variabel, maka akan dilihat nilai koefisien korelasi parsial (r^2) dan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien korelasi partial mencerminkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi atau perubahan variabel terikat, sedangkan koefisien determinasi mencerminkan kemampuan variabel-variabel bebas secara serentak menjelaskan variasi atau perubahan dari variabel terikat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2) nol variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Selain itu koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar 0,788. Tampak bahwa semua signifikansi di atas 0,05. Interpretasinya adalah bahwa nilai residualnya terdistribusi secara normal. Hasil pengujian Multikolinieritas yang ditunjukkan pada nilai *tolerance* variabel bebas tidak kurang dari 10 % atau 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) semuanya kurang dari 10 yang berarti tidak ada Multikolinieritas antar variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua nilai VIF di bawah 10 atau nilai *tolerance* di atas 0,1. Berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam penelitian ini. Adapun hasil uji Glejser menunjukkan sig variabel anggaran pembangunan tahun sebelumnya terdapat absolut residual sebesar $0,206 > 0,05$, sig variabel Jumlah Penduduk absolut residual sebesar $0,760 > 0,05$ sedangkan sig variabel Pajak absolut residual sebesar $0,240 > 0,05$. Hal ini menunjukkan tidak satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi nilai absolut residual sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Begitu pula hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi. Hal ini diperoleh dari uji *breusch-godfrey*, diperoleh R^2 sebesar 0,294 dan jumlah sampel 15, $p = 3$, maka X^2 hitung sebesar $(15 \times 0,294) = 4,41$, sedangkan nilai X^2 tabel dengan df (3;0.05) sebesar 2,353. Karena X^2 hitung $> X^2$ tabel, maka model persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya, Jumlah Penduduk dan Penerimaan Pajak terhadap Anggaran Pembangunan digunakan metode analisis regresi berganda. Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Pengaruh Variabel Bebas terhadap Anggaran Pembangunan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-52,053	30,311		-1,717	,114
	AP (t-1)	,567	,229	,629	2,481	,031
	JP	3,596	1,902	,338	1,891	,085
	PJK	,036	,100	,096	,356	,728
R	= 0,839					
R^2	= 0,704					
F	= 8,704					
Sig F	= 0,03					

Sumber : Data diolah dengan SPSS 21, Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil koefisien regresi (β) sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$AP = \beta_0 + \beta_1 AP_{(t-1)} + \beta_2 JPdk + \beta_3 Pjk + e$$

$$AP = -52,053 + 0,567 AP_{(t-1)} + 3,596 JP + 0.036 PJK + \mu$$

Hasil dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien β_0 sebesar -52,053, jika variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), Jumlah Penduduk (JP), dan Pajak (PJK), konstan atau $X = 0$, maka Anggaran Pembangunan sebesar turun sebesar 52,053.
2. Nilai koefisien $\beta_1 = 0.567$. Artinya jika variabel Jumlah Penduduk (JP), dan Pajak (PJK), konstan dan variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka Anggaran Pembangunan mengalami peningkatan sebesar 0.567. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya dan Anggaran Pembangunan karena semakin naik Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya maka Anggaran Pembangunan semakin meningkat.
3. Nilai koefisien $\beta_2 = 3,596$. Artinya jika variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), dan Pajak (PJK), konstan dan variabel jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka Anggaran Pembangunan mengalami peningkatan sebesar 3,596. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Jumlah Penduduk dan Anggaran Pembangunan karena semakin naik Jumlah Penduduk maka Anggaran Pembangunan semakin meningkat.
4. Nilai koefisien $\beta_3 = 0,036$. Artinya jika variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), dan Jumlah Penduduk (JP), konstan dan variabel Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka Anggaran Pembangunan mengalami peningkatan sebesar 0,036. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pajak dan Anggaran Pembangunan karena semakin naik Pajak maka Anggaran Pembangunan semakin meningkat.
5. Nilai *Standar Error* sebesar 0.229 hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai *Standar Error* maka persamaan tersebut semakin baik untuk dijadikan sebagai alat untuk diprediksi karena menunjukkan bahwa model persamaan regresi makin tepat dalam memprediksi variabel Anggaran Pembangunan sebagai variabel terikat. Dalam regresi ini, *Standard Error of Estimate* menunjukkan nilai yang cukup rendah. Hal ini berarti model persamaan regresi tepat digunakan untuk memprediksi variabel Anggaran Pembangunan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji secara simultan untuk mengetahui apakah variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), Jumlah Penduduk (JP), dan Pajak (PJK), secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Anggaran Pembangunan.

Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada di atas, pengaruh variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), Jumlah Penduduk (JP), dan Pajak (PJK), secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Anggaran Pembangunan, maka diperoleh nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji t

Pengaruh Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), terhadap alokasi Anggaran Pembangunan (AP) menunjukkan nilai signifikan $< \alpha$ ($0.031 < 0.05$) dengan nilai β_1 sebesar 0,567, berarti variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya

berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap alokasi Anggaran Pembangunan pada taraf kepercayaan sebesar 5 %, dengan demikian hipotesis diterima.

Pengaruh Jumlah Penduduk (JP), terhadap alokasi Anggaran Pembangunan (AP) menunjukkan nilai signifikan $< \alpha$ ($0.085 < 0.1$) dengan nilai β_2 sebesar 0.395, berarti variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap alokasi Anggaran Pembangunan pada taraf kepercayaan sebesar 10 %, dengan demikian hipotesis diterima.

Pengaruh Pajak (PJK), terhadap alokasi Anggaran Pembangunan (AP) menunjukkan nilai signifikan $> \alpha$ ($0.728 > 0.05$) dengan nilai β_3 sebesar 0.036, berarti variabel Pajak tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap alokasi Anggaran Pembangunan pada taraf kepercayaan sebesar 5 % dan 10 %, dengan demikian hipotesis diterima.

Koefisien Determinasi (R^2) atau Uji *Goodness of Fit*

Tabel di atas dengan nilai R sebesar 0,704 dan koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,704, hal ini menjelaskan bahwa sebesar 70,4 % variabel Anggaran Pembangunan tahun sebelumnya ($AP_{(t-1)}$), Jumlah Penduduk (JP), dan Pajak (PJK) terhadap Alokasi Anggaran Pembangunan, masih terdapat 29,6 % variabel Anggaran Pembangunan yang dijelaskan oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Anggaran Pembangunan Tahun Sebelumnya terhadap Alokasi Anggaran Pembangunan

Hasil analisis regresi pada di atas menunjukkan nilai koefisien anggaran pembangunan tahun sebelumnya sebesar 0,567, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,031. Hasil ini secara statistik berpengaruh signifikan karena di bawah *level of significance* yang telah ditentukan. Oleh karena itu hipotesis pertama diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara anggaran pembangunan tahun sebelumnya terhadap alokasi anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2000-2015.

Komponen terbesar dalam menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SiLPA dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan, kebijakan penutup defisit diupayakan secara bertahap pada sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya, artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu terus meningkatkan upaya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. SiLPA yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain : (i) sisa penghematan belanja atau efisiensi anggaran belanja; (ii) sisa anggaran karena kegiatan yang tertunda yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; (iii) pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan Richard (1991) dan Brownell (1981) yang menyatakan bahwa semakin besar anggaran periode tahun sebelumnya, maka semakin besar pula anggaran periode tahun berjalan karena anggaran pembangunan pada tahun sekarang juga terdapat di dalamnya anggaran pembangunan tahun sebelumnya yang tidak habis terpakai (sisa anggaran).

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Anggaran Pembangunan

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran pembangunan. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah karena tingginya pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang mengakibatkan kesejahteraan penduduk menjadi terganggu. Bila kenaikan penduduk lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan penduduk akan semakin kecil artinya terjadi pengurangan jumlah pendapatan per kapita.

Sejalan dengan Devas (1989) dan Mubiarto (2000), yang menyatakan bahwa variabel tersebut signifikan disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami *trend* yang positif, kecuali tahun 2005 yang mengalami *trend* yang negatif.

Menurut Sobri (1987), mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan investasi (*capital stock*) dalam hal ini anggaran pemerintah daerah (APBD) adalah faktor penduduk, dan lebih lanjut dikatakan bahwa besarnya anggaran pemerintah daerah (APBD) juga merupakan fungsi dan besarnya rotasi pengumpulan dana untuk pembangunan dari masyarakat yang diukur dari peningkatan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan Audiffret dalam Adisasmita (2009), yang menyatakan bahwa 1) Pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian bagi penduduk sederhana, sehingga kebijakan yang ditempuh pada waktu melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu; 2) Kemampuan melaksanakan pemerintahan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan, tanpa kemampuan pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijakan yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah, dimana semua kepentingan masyarakat sederhana sangat erat hubungannya; 3) Anggaran merupakan alat utama dalam pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dibutuhkan haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana.

Pengaruh Pajak terhadap Alokasi Anggaran Pembangunan

Tabel diketahui bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran pembangunan dan berhubungan positif terhadap alokasi anggaran, sehingga untuk mendapatkan penambahan alokasi pendapatan yang besar harus diikuti dengan penambahan penerimaan pajak yang lebih besar lagi. Hal ini tidak sejalan dengan temuan yang dilakukan dengan Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, dan Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan injeksi terhadap anggaran pembangunan suatu daerah, semakin tinggi penerimaan pajak semakin meningkat anggaran pembangunan suatu daerah.

Sejalan dengan Teori Peacock dan Wiseman, menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajaknya tetap tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Guritno, 2001).

Di samping menurut Bahrul (2010), PAD digunakan sebagai stimulus oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan identik dengan proses belanja daerah. Semakin besarnya nilai PAD suatu daerah, maka dana dialokasikan juga semakin besar. Hal ini mengakibatkan PAD dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Selain itu tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja pemerintah dikenal dengan nama *tax spend* hipotesis (Azis et al, 2000; Doi 1998; Von. Furnsterberg et al, 1986 dalam Abdulah dan Halim, 2003).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel anggaran pembangunan tahun sebelumnya dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2000-2015, sedangkan variabel jumlah penerimaan pajak dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap perubahan jumlah anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Variabel bebas dengan nilai $R^2 = 0,704$ adalah valid menunjukkan bahwa nilai tersebut 70,4 % digunakan untuk memprediksi perubahan jumlah anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan selebihnya 29,6 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Saran

1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah khususnya alokasi anggaran pembangunan maka pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
2. Untuk meningkatkan PAD agar dapat mempengaruhi anggaran pembangunan secara signifikan pemerintah melakukan dengan mengoptimalkan pajak daerah dan aspek lainnya.
3. Jumlah penerimaan pajak tidak signifikan terhadap jumlah anggaran pembangunan dari tahun 2000-2015 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan usaha-usaha diversifikasi pajak secara maksimal baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi karena penerimaan pajak termasuk dalam unsur injeksi APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul, Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*, Yogyakarta, Hal 1140 – 1159.
- Achil. 1997. *Anggaran Pembangunan Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 1997. *Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan*, Modul Pada Program Diklat.
- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Pendanaan Pemerintah Daerah*. C.V. Budi Daya Makassar.
- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. C.V. Budi Daya Makassar.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Teori Ekonomi Pembangunan Daerah*, Intermedia, Jakarta.
- Arsyad, Nurjaman dkk. 1992. *Keuangan Negara*, Intermedia, Jakarta.
- Brownell dkk. 1981. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Pembangunan di Negara Berkembang*, Jurnal Ekonomi Internasional.
- Davey, K. J. 1998. *Public Economic*, New Jersey : Prentice Hall.
- Davis. 1986. *Public Service*, VCH. Weinheim.
- Devas, Nick. 1989. *The Indonesia Economic, Budget Development*, New Jersey, Prentice Hill.
- Due, F. John. 1985. *Government Finance*, McGraw-Hill, New York.
- Guritno, Mangkoesebroto. 2000. *Public Administration*, Ministry of Publik Works, Jakarta.
- Guritno, Mangkoesebroto. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Hayek. 1985. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 1 No. 2, 42-51.

- Hill, H. 1992. *Economic Development Government of Indonesia* New York, Oxford University.
- Jhingan, M. L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Jones. 2001. *Public Economic*, Saint Martin's Press Inc, New York.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi Ke-3 UI-Press, Jakarta.
- Kwik Kian Gie. 2002. *Pertumbuhan Ekonomi dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara dan Daerah*, ANDI, Jakarta.
- Lewis. 2001. *Planning and Budgeting In Poor Countries*. New Brunswick, NJ : Transaction.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, P.T. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 1999. *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, National Seminar Promoting Good Governance, Makalah, PAU – SE UGM, Yogyakarta.
- Mirazza. 1995. *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makro Ekonomi*. Gramedia, Jakarta.
- Musgrave, dkk. 1984. *Public Expenditure Theory*, Saint Martin's Press Inc, New York.
- Musgrave, P dan Musgrave, R. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Erlangga, Jakarta.
- Mustopadidjaya. 1997. *Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Intermedia, Jakarta.
- Noprin. 1996. *Modul Globalisasi dan Regional Ekonomi Indikator dan Trend Ekonomi Daerah*, Yogyakarta.
- Ozmar Azfar. 1999. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (1) : 95 - 120.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (penyempurnaan Permendagri No. 13 Tahun 2006).
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah : Studi Empirik di Wilayah Jawa Tengah dan DIY*. JAAI, Vol 08 No. 2.
- Richard. 1991. *The Theory of Territory Development Budget*, Saga Publications, London.
- Rumarjo. 1996. *Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Gramedia, Jakarta.
- Sabeni, Arifin – Imam Ghozali. 1995. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 3, BPFE – Yogyakarta.
- Sadono. 1994. *Pertumbuhan Penduduk*, Ganesa, Bandung.
- Samuelson. 1996. *Financial Management*, McGraw-Hill, New York.
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siagian, S.P. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soediyono. 2000. *Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Liberty. Yogyakarta.
- Soemitro, Rachmat. 1989. *Pajak Pembangunan Daerah*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiono. 1999. *Metode Penelitian*, Alfabet, Bandung.
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi ke-3, BPFE, Yogyakarta.

- Syafrie, YH. 2008. *Otonomi Daerah dan Anggaran Berbasis Publik*. (Online). <http://ilmupemerintahan.blogspot.co.id/2008/04/otonomi-daerah-dan-anggaran-berbasis.html>
- Tjokroamijoyo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Todaro. 1987. *Anggaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*. Ganesa. Bandung.
- Todaro, M. P. 2000. *Economic Development*, 7th Edition, Addison-Wesley Logman, London.
- Trech. 1981. *Public Economic*, Sage Publications. London.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Penyempurnaan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999).
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.